

Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945

Nadine Rifa Riady^{1*}, Nurzengky Ibrahim², Sri Martini³.

¹ Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, Jakarta Timur, 13220, nadinerr25@gmail.com

² Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, Jakarta Timur, 13220, nurzengkyibrahim@unj.ac.id

³ Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, Jakarta Timur, 13220, srimartini7271@gmail.com

*¹Corresponding email: nadinerr25@gmail.com

Abstract

Social and economic aspects became two inseparable aspects during the Japanese occupation of Indonesia. Various economic policies implemented to meet the needs of the Asia Pacific war have an impact on people's social life. Likewise, in Bogor Shū, which is one of the residencies in Indonesia. This study aims to determine the life of the people in Bogor during the Japanese occupation which was studied with socio-economic aspects. This study used historical research methods with several stages of research, namely topic selection, heuristics or source collection, source criticism, interpretation, and historiography or historical writing. Various economic policies implemented by the Japanese occupation government in the fields of agriculture and plantations, trade, and cooperatives have influenced the social life of the people in Bogor. In order to realized its mission and objectives, the occupying government used all means, either through propaganda, education, the role of community leaders, and mobilizing manpower. The policies implemented by the Japanese occupation government had a very pronounced impact on the people in Bogor.

Keywords

Japanese Occupation; socio-economic; Bogor

Abstrak

Aspek sosial dan ekonomi menjadi dua aspek yang tidak terpisahkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan perang Asia Pasifik memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat. Begitupun halnya di Bogor *Shū* yang menjadi salah satu karesidenan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan masyarakat di Bogor pada masa pendudukan Jepang yang dikaji dengan aspek sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan beberapa tahapan penelitian, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dalam bidang pertanian dan perkebunan, perdagangan, dan koperasi telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di Bogor. Guna mewujudkan misi dan tujuannya, pemerintah pendudukan menggunakan segala cara, baik melalui propaganda, pendidikan, peranan tokoh masyarakat, dan mengerahkan tenaga kerja. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang memberikan dampak yang sangat terasa bagi masyarakat di Bogor.

Kata kunci

Pendudukan Jepang; sosial-ekonomi; Bogor

**Received:* 19 July 2022

**Accepted:* 30 October 2022

**Revised:* 24 October 2022

**Published:* 31 October 2022

PENDAHULUAN

Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Meskipun Jepang menduduki Indonesia hanya selama 3,5 tahun, namun telah membawa perubahan yang besar, termasuk dengan membagi Indonesia menjadi tiga wilayah yaitu, Sumatera di bawah kepemimpinan Angkatan Darat (AD) ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, serta Kalimantan dan Indonesia bagian Timur yang berada di bawah kepemimpinan Angkatan Laut (AL). Di awal masa pendudukan, Jepang mengubah sistem pemerintahan di Jawa dan Madura dengan membagi wilayah menjadi tujuh belas *shū* (karesidenan), salah satunya adalah Bogor *Shū* atau Karesidenan Bogor. Dengan terbentuknya pemerintahan baru, maka Jepang melaksanakan kebijakan-kebijakan terutama untuk meningkatkan produksi pangan. Berbagai cara dilakukan oleh Jepang untuk mencapai tujuannya.

Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Jepang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Bogor. Kondisi sosial sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial atau kehidupan sosial, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial dan kemasyarakatan yang meliputi budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi ekonomi adalah suatu kemampuan yang diukur dari keuangan, pendapatan, produksi dan konsumsi (termasuk transportasi dan tabungan) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, keduanya beriringan dengan kehidupan masyarakat. Bidang sosial dan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ternyata memberikan dampak bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Ilmu sosial juga merupakan suatu bidang ilmu yang dapat berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Jika melihat keadaan dan kondisi secara langsung pada masyarakat, kemiskinan merupakan topik permasalahan yang seringkali melibatkan ilmu sosial dan ekonomi (Soelaeman, 2011).

Sosial dan ekonomi menjadi bidang kehidupan yang berdampak besar dan berpengaruh selama periode pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa contoh permasalahan sosial-ekonomi yang tampak pada masa pendudukan Jepang di Bogor adalah kemiskinan, pengurangan tenaga rakyat, juga peranan para tokoh Islam dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ekonomi. Maka dari itu, peneliti berupaya menelaah mengenai kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di Bogor, dan bagaimana dampak dari pendudukan Jepang. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan jawaban mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang, yang mana mengkaji mengenai perubahan yang terjadi.

Objek kajian dari penelitian ini menitikberatkan pada wilayah Bogor di masa pendudukan Jepang yaitu Bogor *Shū*, karena Bogor merupakan salah satu wilayah strategis dan relatif memiliki jarak yang cukup dekat dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Selain itu, Bogor juga menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup berpengaruh. Namun, keadaan mengalami perubahan selama masa pendudukan Jepang. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan peranan dalam kegiatan ekonomi, maka tidak heran jika Bogor menjadi salah satu wilayah yang cukup berpengaruh. Dalam artikel ini, membahas mengenai keterkaitan antara aktivitas dan kebijakan ekonomi dengan kehidupan sosial masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945 yang mana mengkaji mengenai pendudukan Jepang di Bogor, pertanian dan perkebunan, perdagangan, dan peranan koperasi (*kumiai*). Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana kehidupan sosial masyarakat sebagai dampak kebijakan ekonomi seperti, kemiskinan, peranan para tokoh dan elite masyarakat, pendidikan, serta pengerahan tenaga rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Dalam metode historis, terdapat beberapa tahapan penelitian, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber yang diperoleh antara lain sumber primer seperti, surat kabar dan majalah pada masa pendudukan Jepang, serta sumber sekunder seperti buku dan artikel. Sumber primer yang digunakan antara lain surat kabar *Tjahaja* dan *Asia Raya*, serta majalah *Djawa Baroe* yang terbit di tahun 1942 hingga 1945 yang tersedia dalam bentuk mikrofilm. Sedangkan untuk sumber sekunder, menggunakan beberapa buku seperti *Bogor Zaman Jepang* oleh Prof. Susanto Zuhdi, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945* oleh Aiko Kurasawa, dan lain sebagainya. Sumber-sumber tersebut berkaitan atau relevan dengan bagaimana situasi dan keadaan masyarakat pada masa pendudukan Jepang, khususnya di wilayah Bogor.

Semua sumber yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan kritik atau verifikasi, baik kritik *ekstern* maupun *intern*. Tahap kritik sumber yang dilakukan meliputi segi akurasi, kesesuaian, keterbaruan, kebenaran, dan keaslian sumber yang diperoleh. Untuk sumber primer, kritik ekstern dilakukan dengan melihat tahun dan bahasa yang digunakan dalam surat kabar apakah relevan dengan masa pendudukan Jepang untuk memastikan autentisitas sumber. Sedangkan untuk kritik intern, dilihat kesesuaian antara isi sumber dengan keadaan yang sebenarnya untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas sumber. Setelah dilakukan kritik atau verifikasi sumber,

langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi di mana sumber-sumber yang telah dikritik selanjutnya akan dianalisis dan dijabarkan secara komprehensif menjadi fakta sejarah. Fakta yang telah diinterpretasi tersebut menjadi bahan yang digunakan untuk tahap penulisan yang tersusun secara sistematis, isi yang logis dan dapat dipahami, serta jelas tujuan dan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif naratif dalam bentuk historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Pendudukan Jepang di Bogor

Pendaratan pertama yang dilakukan oleh pasukan Jepang di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 1 Maret 1942 menjadi awal bagaimana kemudian Jepang melebarkan pengaruh serta kekuasaannya di seluruh Pulau Jawa maupun pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada kedatangan pertama di Jawa Barat, pasukan Jepang dibagi menjadi dua kelompok, satu sisi di pantai daerah Banten dekat Merak dan Teluk Banten. Juga di sisi lain telah siap dan berjaga pasukan Jepang yang berjumlah sebanyak 5000 orang di Eretan, wilayah sebelah barat Cirebon (Zuhdi, 2017).

Komandan Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger atau KNIL, Jenderal Ter Poorten, menyatakan menyerah kepada Jepang tanpa ada diskusi terlebih dahulu dengan para petinggi militer (Kahin, 1970). Melihat bagaimana Belanda terkesan terburu-buru dalam menyerah dan menerima tuntutan, menandakan bahwa pasukan Belanda tidak percaya diri dan tertekan karena mengidentifikasi akan kekalahan yang di depan mata. Terlebih, pasukan yang kurang bersemangat selama melawan serangan Jepang yang sangat gencar. Jepang pun secara resmi menduduki Jawa pada 8 Maret 1942. Terlampir dalam *Osamu Seirei* nomor 1, pasal 1, tertanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima Angkatan Darat ke-16, pendudukan militer yang dilakukan oleh Jepang sendiri hanya bersifat sementara (Fadli & Kumalasari, 2019).

Pendaratan Jepang di Jawa Barat, terbagi di daerah Banten dan Eretan (Cirebon). Kelompok pasukan yang mendarat di Teluk Banten dengan segera masuk ke arah timur dalam dua rute. Yang pertama melalui Serang–Balaraja menuju arah Tangerang, dan rute lain ke arah Serang–Rangkasbitung menuju ke Bogor. Perjalanan pasukan Jepang tentu tidak mudah. Sebelum meninggalkan Hindia Belanda dan terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Jepang, pasukan Belanda melakukan bumi hangus dengan menghancurkan berbagai tempat atau fasilitas penting yang akan menguntungkan gerak pasukan Jepang, seperti jalan, jembatan, jalur kereta, dan lain sebagainya. Cara tersebut ternyata berdampak pada gerak pasukan Jepang yang hendak menuju Bogor yang membutuhkan waktu empat hari lamanya. Pasukan Jepang pun mulai memasuki daerah Leuwiliang melalui Lawangtaji atau Jasinga dan ke Gunung Galoga di Leuwiliang. Meskipun begitu, tanpa waktu lama, Jepang berhasil memukul mundur pasukan Sekutu. Jepang juga diuntungkan dengan sikap masyarakat yang menyambut mereka dengan gembira dan dengan senang hati membantu untuk

menghalangi gerak pasukan Sekutu. Pada 5 Maret 1942, Jepang pun berhasil menduduki Leuwiliang setelah memukul mundur pasukan *Black Force* Australia (Zuhdi, 2017).

Setelah menduduki Leuwiliang, Jepang melanjutkan perjalanan melalui Semplak untuk masuk lebih dalam ke wilayah Bogor. Pihak Belanda sendiri berupaya melakukan perlawanan dan pertahanan dengan membentuk “Pasukan Penjaga Kota” atau dalam bahasa Belanda disebut *Stadswacht*. Di hari yang sama, pasukan Jepang yang menuju Serang–Balaraja–Tangerang tiba di Jakarta, setelah satu hari yang lalu menjadi “kota terbuka” dan tidak dipertahankan lagi. Sehingga pasukan tersebut menuju ke arah Bandung melalui Bogor dan Sukabumi (Zuhdi, 2017). Setelah mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942, Jepang terus melancarkan ekspansinya dan berupaya merebut daerah-daerah penting di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Bandung, Jakarta, Cirebon, dan daerah lainnya. Bogor menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan Jepang ketika sampai di wilayah Jawa Barat pertama kali.

Walaupun banyak terjadi perbedaan kondisi antara sebelum dan setelah masuknya pendudukan Jepang, wilayah Bogor tidak jauh berbeda. Berkas-berkas administrasi pada masa pendudukan Jepang masih menggunakan peninggalan Hindia Belanda, hanya ada penggantian namanya saja. Sebuah *shū* atau karesidenan dipimpin oleh *shuuchoukan* (gubernur), yang mana *shūchōkan* pertama di Bogor adalah Kolonel Sonoyama yang dilantik pada September 1942. Bogor *Shū* terdiri dari wilayah *Ken* (kabupaten) dan *Shī* (kotapraja). Untuk daerah *ken*, terdiri dari Bogor *Ken*, Sukabumi *Ken*, dan Cianjur *Ken*. Sedangkan daerah *shī* terbagi menjadi Bogor *Shī* dan Sukabumi *Shī*. Bogor *Ken* terdiri dari beberapa distrik atau *gun*, yaitu Parungpanjang, Lemahabang, Cibarusa, Jonggol, Cileungsi, Cibinong, Depok, Cigombong, Kopo atau Cisarua, Ciawi, Kedunghalang, Parung, Semplak, Ciomas, Dramaga, Ciampea, Leuwiliang, Cigudeg, Jasinga, dan Bogor. Sedangkan di Sukabumi *Ken*, juga terdapat beberapa *Gun*, yaitu Cicurug, Parungkuda, Klapanunggal, Cikidang, Cibadak, Cisaat, Ciemas, Jampang Kulon, Lengkong, Bojonglopang, Sagaranten, dan Miramontana (Zuhdi, 2017).

Wilayah Bogor *Shū* merupakan daerah dataran tinggi, sehingga banyak perkebunan dan hasil alam seperti kopi, kina, teh, tebu, biji pala, cengkeh, dan lada. Selain itu dalam pertanian, penanaman padi juga cukup baik serta hasil alam kapur dan sarang burung. Melihat kondisi masyarakat pada sebelum masa pendudukan Jepang, pada tahun 1930, mayoritas masyarakat Karesidenan Bogor bekerja sebagai petani. Hal tersebut membuktikan bahwa lahan pertanian dan persawahan cukup banyak tersedia di Bogor. Di masa pendudukan Jepang, bidang pertanian pun masih tetap menjadi andalan untuk mata pencaharian masyarakat. Selain petani, masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai buruh tani, pekerja industri rumahan, maupun bekerja ke Jakarta. Industri rumahan yang dijalankan oleh masyarakat antara lain, industri sepatu, baju, bedak, pakaian dalam, gula aren, sarung, pandai besi, dan lain sebagainya (Sudrajat, 2015).

Kebijakan Jepang dalam Pertanian dan Perkebunan

Setelah berhasil menaklukkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada Maret 1942, Jepang yang baru saja membentuk pemerintahan baru segera berfokus pada kegiatan pertanian guna mendukung ekonomi perang. Pada awal masa pendudukan, pemerintah Jepang berupaya meningkatkan hasil produksi dan efektivitas pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kampanye atau propaganda “melipatgandakan hasil”. Propaganda dilakukan melalui film, lagu, pertunjukan kesenian dan sandiwara, maupun melalui media cetak seperti surat kabar. Upaya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan bidang kesenian sebagai media komunikasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Propaganda juga banyak dilakukan dengan menggunakan lagu-lagu dengan lirik tentang petani maupun anjuran untuk bertani. Melalui lagu, pesan dan propaganda yang disebar oleh pemerintah pendudukan Jepang dapat lebih mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat. Misalnya dari lagu anak-anak yang berjudul *Orang Tani* (Tjahaja, 13 Februari 1943).

Dalam rangka meningkatkan pertanian, pemerintah membuka lahan yang masih kosong atau mengubah fungsi lahan untuk penanaman padi. Akibatnya, banyak lahan perkebunan maupun perikanan yang dialihfungsikan menjadi persawahan. Salah satu contohnya adalah perkebunan teh di Cipanas, Bogor yang berhenti beroperasi pada masa pendudukan Jepang karena permasalahan modal dan distribusi hasil produksi (Saring & Husin, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Jepang memang tidak terlalu memperhatikan sektor perkebunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial. Di Kawedanan Cibadak dan Cicurug, Sukabumi, banyak kebun teh yang diolah oleh masyarakat dibongkar untuk dijadikan lahan padi huma dan tanaman palawija. Pemerintah pun meminjamkan 500 hektare lahan kosong untuk ditanami oleh masyarakat di Bogor, khususnya di Ciawi *Gun*, Jasinga *Gun*, dan Leuwiliang *Gun* (Tjahaja, 15 Mei 1943). Selain alih fungsi lahan, pemerintah pendudukan Jepang juga berusaha mengurangi penanaman tanaman lain yang tidak berkontribusi langsung untuk mendukung ekonomi perang, yang kemudian digantikan dengan penanaman padi secara intensif.

Penanaman bibit padi diatur oleh pemerintah dengan alasan menghasilkan panen yang lebih baik. Pemerintah pendudukan Jepang sempat melarang penanaman padi gadu karena menjadi penyebab penyakit malaria yang datang dari sistem irigasi yang buruk. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, pemerintah pendudukan Jepang mulai mengupayakan kembali penanaman padi gadu secara bertahap di beberapa daerah. Di Kawedanan Ciranjang, padi gadu diizinkan untuk ditanam dengan luas 2.500 hektare tanah, di Kawedanan Cianjur seluas 1.500 hektare, sedangkan di Kawedanan Sukanegara saat itu belum diizinkan untuk menanam padi gadu karena masih dalam proses penyelidikan dan penelitian lebih lanjut (Tjahaja, 13 Januari 1943).

Di bidang perkebunan, karet menjadi salah satu tanaman yang penting dan juga menjadi bidang industri yang cukup berkembang di Pulau Jawa, karena berkaitan dengan kebutuhan perang (*Djawa Baroe*, 1 Maret 1943). Pemerintah militer Jepang dengan ketat mengawasi dan mengatur penanaman karet. Sehingga, untuk dapat mengelola perkebunan karet, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah (Zuhdi, 2017). Bagi pemilik kebun karet, harus pula menjual getah bersama dengan lisensinya atau pemberian izin. Getah karet juga hanya boleh dijual jika disertakan dengan lisensinya. Selain itu, ditetapkan pula bahwa harga maksimal getah karet yang diizinkan adalah f 0,17 per kilogram (*Tjahaja*, 1 Februari 1943).

Pada masa pendudukan Jepang, ditekankan pula mengenai penanaman kapas karena rendahnya angka produksi kapas. Kelangkaan pakaian yang terjadi karena hasil produksi kapas yang rendah, bahkan menjadikan pakaian sebagai alat tukar (Kurasawa, 2015). Di Sukabumi, Jampangkulon *Gunchō* bahkan menganjurkan setiap keluarga untuk menanam 25 pohon kapas di rumah atau lahan masing-masing. Jenis kapas yang dianjurkan adalah kapas mori. Kebijakan tersebut membuahkan hasil, perusahaan tenun rakyat pun memuaskan bahkan hingga mendapatkan permintaan kapas dari Cirebon (*Tjahaja*, 29 Maret 1943).

Dalam rangka mendukung kebutuhan militer dan perang, pemerintah pendudukan Jepang berupaya meningkatkan produksi tanaman jarak sebab beragam manfaatnya yang sangat penting. Biji dari tanaman jarak dapat diolah menjadi bahan pelumas mesin dan pesawat terbang, maupun berbagai olahan lain seperti campuran bahan untuk membuat sabun (Zuhdi, 2017). Pemerintah pendudukan Jepang bahkan mengumumkan berita terkait informasi penanaman jarak. Benih tanaman jarak sendiri telah dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia, selain daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pemerintah menetapkan harga tertentu untuk benih tanaman jarak yang berbeda antar setiap *shū* (*Tjahaja*, 12 Februari 1943).

Kebijakan Jepang dalam Perdagangan dan Koperasi (*Kumiai*)

Masyarakat turut aktif dalam menjalankan perekonomian pada masa pendudukan Jepang. Meskipun begitu, pemerintah pendudukan Jepang mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan yang berlangsung di masyarakat. Penduduk di Puraseda, Leuwiliang dan Cimulang, menjalankan penjualan pucuk teh yang dikumpulkan dari masyarakat dengan harga 4 sen per kilogram. Setiap minggu, mereka membutuhkan 2000 kilogram teh untuk dijual. Penjualan pucuk teh tersebut dipimpin oleh seorang ahli teh yang berasal dari Jepang (*Tjahaja*, 20 Februari 1943). Pemerintah juga mengatur kebijakan terkait penjualan bahan pakaian. Terdapat golongan masyarakat tertentu yang diizinkan untuk membeli bahan pakaian, yaitu bagi masyarakat yang tidak memiliki pakaian sama sekali, masyarakat yang hanya memiliki satu potong pakaian, masyarakat dengan pakaian yang tidak layak pakai, serta masyarakat yang memerlukan untuk kewajiban pekerjaan atau tuntutan perusahaannya (*Tjahaja*, 31 Juli 1943).

Pada masa pendudukan, terjadi berbagai permasalahan seperti kelangkaan barang, ketidakstabilan harga, dan juga banyak terjadi perdagangan gelap. Guna mengatasi berbagai permasalahan, pemerintah pendudukan Jepang melakukan berbagai kebijakan, salah satunya dengan menetapkan peraturan masuk dan keluarnya barang. Misalnya di Sukabumi, pemerintah *kenchō* dan *shīchō* menetapkan beberapa barang yang tidak boleh dibawa ataupun dikirim ke luar Sukabumi, seperti padi dan beras, garam, ikan asin, gula pasir, minyak kelapa, tenun, kain, pakaian jadi untuk dijual, dan lain sebagainya (*Tjahaja*, 10 Maret 1943). Pemerintah Bogor *Shū* juga cenderung ketat dalam mengawasi kepemilikan dan menjaga persediaan barang di seluruh Bogor yang harus mendapatkan izin dari kantor Bogor *Shū* bagian perekonomian (*Tjahaja*, 18 Mei 1943).

Selain itu, pemerintah juga mengatur penetapan harga barang, misalnya terkait harga minyak kelapa. Pemerintah Sukabumi *Shī* dan Sukabumi *Ken* juga mengurus penjualan minyak kelapa dengan menetapkan harga bagi koperasi yaitu f 3,0 per kaleng, untuk warung seharga f 3,60 per kaleng, dan untuk masyarakat umum dijual seharga f 0,15 per botol bir (*Tjahaja*, 23 Maret 1943). Di Cianjur *Ken*, harga minyak kelapa eceran yang dijual di warung adalah 12 sen per botol bir ukuran 670 cc terhitung mulai 28 April 1943. Hal tersebut diputuskan berdasarkan ketetapan Kantor Bogor *Shū* (*Tjahaja*, 7 Mei 1943).

Pemerintah pada masa pendudukan Jepang juga berupaya untuk memperluas pasar guna meningkatkan kegiatan perdagangan di Bogor *Shū*. Di Bogor *Shī*, pemerintahan haminte (kotapraja) merencanakan anggaran sebesar f 2.950 untuk memperluas pasar-pasar di Jembatan Merah, Pasar Anyar, Pasar Empang, dan pasar lainnya (*Tjahaja*, 17 Februari 1943). Realisasi perluasan pasar-pasar tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 1943 (*Tjahaja*, 9 Juli 1943). Di Cianjur *Ken*, kantor bagian Jawatan Pasar juga berencana mendirikan pasar di Cikalong dengan besar anggaran f 2.000 (*Tjahaja*, 5 April 1943). Dalam kegiatan perekonomian, selain melakukan perdagangan, masyarakat di Bogor *Shū* juga mendirikan berbagai industri atau perusahaan. Usaha tersebut menghasilkan berbagai produk yang beragam, mulai dari kerajinan tangan, pakaian, sepatu, dan berbagai produk keperluan sehari-hari. Dengan berkembangnya usaha rakyat, pemerintah pun berupaya untuk memajukan bidang ini dengan memberikan bantuan kepada para pengusaha. Di Cianjur, seorang pengusaha menyamak kulit mendapatkan bantuan sebesar f 300 dari Kantor Perekonomian Kabupaten Cianjur (*Tjahaja*, 12 Februari 1943).

Perdagangan sangat berkaitan erat dengan kegiatan koperasi atau *kumiai*. Sehingga koperasi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan perdagangan di Bogor. Kegiatan koperasi pada masa pendudukan Jepang di Bogor diatur dan diawasi oleh Kantor Penerangan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri atau *Shomin Kumiai Chūō Zimusho*. Perkembangan dan jangkauan koperasi semakin meluas di Bogor *Shū*. Sebagai contoh di Sukabumi, dalam hasil laporan penutup Koperasi Rakyat Indonesia (KRI) pada tahun 1942, jumlah anggota yang terdaftar dalam KRI Sukabumi

mencapai 19.000 orang dengan 126 cabang koperasi yang tersebar. (Zuhdi, 2017). Di akhir tahun 1942, juga sudah terdaftar 250 warung di lima daerah di Sukabumi, sehingga didirikan warung pusat yang bertugas mengurus penjualan umum (*Tjahaja*, 6 Januari 1943). Untuk mengurus dan mewadahi seluruh koperasi di Bogor *Shū*, maka dibentuk badan Pusat Koperasi Bogor *Shū* yang memiliki cabang di masing-masing daerah (*Tjahaja*, 6 April 1943). Perkembangan koperasi di Bogor *Shi* dan *Ken* dapat dikatakan cukup besar. Terhitung hingga bulan Juni 1943, telah ada 6 perkumpulan koperasi. Bahkan, ada koperasi yang memiliki sebanyak 121 cabang warung sebagai anggota (*Tjahaja*, 18 Juni 1943).

Pada pertengahan tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang di Bogor *Shū* mulai mencanangkan pendirian koperasi di desa-desa. Keputusan tersebut berdasarkan hasil pertemuan Bogor *Shi* di Pancasan pada 29 Juni 1943. Koperasi desa atau *Ku Kumiai* didirikan secara bertahap mulai tanggal 2–11 Juli 1943 (*Tjahaja*, 2 Juli 1943). Sebagai bentuk bahwa pemerintah Jepang memperhatikan perkembangan koperasi di berbagai wilayah, pemerintah memberikan bantuan modal bagi koperasi. Pada akhir tahun 1943, kegiatan koperasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan keputusan Bogor *Shū Keizai Tosei Katyō*, seluruh wilayah Bogor *Ken* dan *Shi* diizinkan untuk mendirikan koperasi. Di antaranya terdapat 13 buah koperasi karet di Leuwiliang dan 28 koperasi yang berpusat di Pusat Koperasi Pajajaran (*Tjahaja*, 7 Oktober 1943). Pemerintah pendudukan Jepang juga memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi guna meningkatkan keterampilan. Misalnya pelatihan pengurus *ku kumiai* yang dilaksanakan di pusat koperasi Pajajaran Babakan I di Bogor pada 20 Januari 1944 (Zuhdi, 2017).

Memasuki tahun 1944 hingga tahun 1945, perkembangan koperasi cukup pesat. Dalam perundingan yang dilangsungkan oleh Bogor *Shūchō* pada awal Januari 1944, diperoleh laporan sementara bahwa 80 persen penduduk tergabung dalam koperasi desa. Pada 31 Mei 1945, dibentuk Bogor *Shū Shōkuryō Haikyū Kumiai* atau Koperasi Pembagian Bahan Makanan. Koperasi tersebut dibentuk dengan tujuan mengatur pembagian beras, palawija, gula, minyak tanah, kopi, ikan asin, dan barang kebutuhan lainnya yang diserahkan oleh pemerintah (Zuhdi, 2017).

Dalam menjalankan kebijakannya terkait koperasi, pemerintah pendudukan Jepang mengharuskan masyarakat untuk menabung. Tabungan yang harus disetorkan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk beras. Setiap satu minggu, beras yang terkumpul akan dijual dan pendapatannya akan masuk ke dalam kas koperasi bersama (*Tjahaja*, 15 Mei 1943). Sebab gerakan menabung tersebut wajib dilakukan, masyarakat bahkan diharuskan untuk membuat tabungan atau celengan dari bambu maupun buntung (Zuhdi, 2017).

Berbagai upaya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang dapat dikatakan cukup berhasil, karena di tahun 1944, jumlah tabungan yang dikumpulkan dari seluruh *tonarigumi* di Jawa adalah sebesar f 10.000.000 (*Djawa Baroe*, 1944b). Pemerintah memanfaatkan berbagai media yang dapat membantu

menyebarkan propaganda, yaitu melalui koran atau surat kabar, majalah, video atau film, radio, serta kesenian dan sastra seperti sandiwara, lagu, cerpen, pantun, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu agar propaganda gerakan menabung dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat (Irianti, 2014).

Kemiskinan dan Upaya Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang belum stabil mengakibatkan masyarakat hidup serba kekurangan. Terlebih lagi adanya beban pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, seperti pajak penghasilan, pajak tanah, pajak usaha, dan lain sebagainya. Meskipun memang terdapat peraturan yang mengatur beban pajak bagi masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat kesulitan mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi sulit untuk mendapatkan uang karena hasil penjualan dari produksi hasil bumi maupun perdagangan dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik. Pemerintah pun memberlakukan wajib serah padi, di mana masyarakat diwajibkannya menyerahkan hasil produksi padi mereka dan dibayar dengan harga yang murah. Dengan wajib serah padi, masyarakat harus menanggung beban hutang dan juga menyerahkan 30 hingga 50 persen hasil produksi padi mereka kepada pemerintah (Sulasman, 2013). Masyarakat bahkan harus menyembunyikan padi atau beras di tempat yang tersembunyi dan aman ketika ada pangreh praja atau petugas pemerintah Jepang yang datang ke rumah-rumah untuk mengambil setoran padi. Banyak pula masyarakat yang menjual beras atau padi di pasar gelap, karena harga yang ditawarkan relatif lebih tinggi (Saring & Husin, 2017).

Kemiskinan menyebabkan kehidupan masyarakat berada di bawah standar kehidupan yang layak. Dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, banyak masyarakat yang hidup kelaparan dan menderita busung lapar, terutama dialami oleh kaum wanita dan anak-anak. Selain itu, juga semakin meningkatnya jumlah peminta-minta atau disebut dengan "*siring*" (Sulasman, 2013). Pada akhir masa pendudukan, kemiskinan dapat dikatakan semakin meningkat. Pada April 1945, pemerintah Bogor *Shū* harus mendatangkan 200 ton beras. Hal tersebut menandakan bahwa adanya kekurangan produksi dan juga bahan kebutuhan makanan. Selain itu, semakin banyak juga pengemis dan masyarakat miskin (Zuhdi, 2017).

Banyaknya masyarakat miskin dan membutuhkan di Bogor *Shū* mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya, yaitu memberikan bantuan tunai, modal, dan menyediakan lowongan pekerjaan. Menurut laporan Kantor Perburuhan dan Amal, terhitung hingga Desember 1942, sudah ada 305 orang yang mendapatkan pekerjaan dengan perantara badan atau kantor perburuhan. Dengan detail sebanyak 298 orang yang memperoleh gaji kurang dari f 25 dan 7 orang dengan gaji lebih dari f 25 hingga f 100 (*Tjahaja*, 13 Januari 1943). Di Bogor, pemerintah menyediakan bantuan tunai sebanyak f 20.280 bagi kebutuhan masyarakat miskin, seperti bantuan tunai, modal, dan biaya pemakaman (*Tjahaja*, 9 Juli 1943). Pemerintah juga

memberikan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Cianjur *Ken* dengan jumlah sebesar f 3000 (Tjahaja, 6 April 1943).

Peranan perkumpulan sosial cukup penting dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dengan bantuan uang dan makanan hingga lowongan pekerjaan. Di Sukabumi, upaya ini dilakukan oleh Pekauman Sukabumi yang menyumbangkan f 150 bagi 500 masyarakat miskin dengan masing-masing mendapatkan 30 sen. Bantuan tersebut dibagikan melalui perantara amil yang mengurus pembagian zakat atau sumbangan di desa-desa (Tjahaja, 30 Januari 1943). Di tahun 1943, Badan Penolong Orang Miskin atau BAPOM (singkatan menurut sumber) memberikan bantuan kepada total 4.462 orang yang mengalami kesulitan dengan membagikan beras secara rutin enam hari sekali (Tjahaja, 13 Februari 1943). Di Cianjur *Ken* juga dibentuk badan penolong yang dipimpin oleh Soehardiman.

Selain bantuan dari badan penolong setempat, biasanya diadakan pertunjukan dan pasar amal yang diadakan untuk membantu masyarakat miskin, pensiunan, serta korban bencana alam. Misalnya pertunjukan amal di Jalan Bintang Jakarta, Cianjur pada Februari 1943, dan pertunjukan amal oleh Gerakan Pemuda Indo Bogor pada Maret 1943. Di Cianjur *Ken*, pasar malam diadakan untuk membantu kaum pensiunan, pengangguran, masyarakat yang kesulitan, dan juga membagikan pakaian bagi anak sekolah yang orang tuanya tidak mampu (Tjahaja, 25 Agustus 1943). Pada tahun 1944, atas anjuran Djawa *Hōkōkai*, telah dikumpulkan 22.000 potong pakaian untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di Bogor *Shū*. Dalam kegiatan amal tersebut, *Fujinkai* (organisasi wanita) memberikan bantuan untuk memperbaiki pakaian-pakaian yang rusak atau robek (Asia Raya, 1944a). Pada 19 September 1944, Bogor *Shū Hōkōkai* membagikan f 1.247 dan 201 potong pakaian untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di seluruh Bogor *Shū*. Sumbangan tersebut dikumpulkan dari penduduk Jepang yang tinggal wilayah setempat (Asia Raya, 1944b). Pada tahun 1945, mulai banyak rumah pemeliharaan guna membantu dan memelihara masyarakat yang menjadi pengemis dan gelandangan yang ada di setiap *son* (Zuhdi, 2017).

Peranan Tokoh Islam dan Elite Masyarakat

Pemerintah Jepang sangat mendukung pendirian dan perkembangan organisasi Islam di masyarakat guna membantu dalam mewujudkan propaganda. Sepanjang pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang memang berupaya membangun hubungan dan kedekatan dengan para tokoh Islam, seperti alim ulama. Sebab pengaruh para ulama cukup kuat dalam masyarakat Indonesia. Guna mengobarkan semangat masyarakat untuk bertani, sering diadakan pertemuan, pengajian, dan syukuran dengan para petani. Di Bogor *Ken*, hasil padi tahun 1943 dikatakan cukup memuaskan. Para tokoh Islam bersama petani di Bogor mengadakan pertemuan di Masjid Bojong, Citayam yang dipimpin oleh Moe'alim Moedjitaba. Dalam pertemuan tersebut, beberapa tokoh ikut menyuarakan pendapat, antara lain H. A. Salim, Harsono Tjokroaminoto, Kartosoedaimo, dan Ir. Sofwan dari MIAI Jakarta. Para

tokoh menganjurkan agar kaum muslimin giat melakukan kewajibannya sebagai muslim dan tetap bekerja bersama dengan pangreh praja (*Tjahaja*, 19 Mei 1943).

Golongan elite masyarakat pun turut berperan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Bogor. Sama halnya dengan tokoh Islam, mereka juga dijadikan sebagai alat oleh pemerintah pendudukan Jepang dalam membantu menjalankan berbagai kebijakan. Golongan elite sendiri dapat berperan dalam ruang lingkup formal maupun informal. Umumnya, peranan elite terlihat pada struktur pemerintahan tradisional di daerah.

Peranan Pendidikan dalam Mendukung Kebijakan Ekonomi

Sebagai bidang yang penting dalam kehidupan, pendidikan memiliki peran yang besar pada masa pendudukan Jepang. Pada Februari 1943, di Cipeujeum *Son*, Cianjur, didirikan sebuah kursus pertanian yang dipimpin oleh Tuan Soemitra (*Tjahaja*, 24 Februari 1943). Di Sukabumi, Kepala Pertanian Sukabumi membuka kursus pertanian pada bulan Maret yang diadakan satu kali setiap minggu di Desa Nyangkowek dan Babakan Pasir, Cicurug. Kursus yang berlangsung selama 4 bulan tersebut dihadiri oleh para petani (*Tjahaja*, 20 Maret 1943). Pada Juli 1943, di Cianjur *Ken* dibuka kursus pertanian di beberapa daerah yaitu, Sukakarta *Ku*, Cibinong Hilir *Ku*, Rancagumi Majalaya, Mande, dan Cikalong (*Tjahaja*, 19 Juli 1943). Pelatihan pertanian pernah diadakan di Sukasari, Bogor (Zuhdi, 2017). Para peserta yang mengikuti pelatihan umumnya adalah para petani dan lulusan sekolah tani. Selama pelatihan, mereka tidak hanya diajarkan tentang bertani, seperti latihan mencangkul saja, tetapi juga mempelajari Bahasa Jepang, cara duduk semadhi atau semedi, serta latihan baris-berbaris (*Djawa Baroe*, 1 Mei 1943). Pada 19 Agustus 1943, mulai diselenggarakan latihan bagi para pemimpin pertanian yang diadakan di Bogor. Dalam pelatihan tersebut, kedatangan orang-orang Jepang yang ahli dalam bidang pertanian yang bertugas untuk mengajarkan para petani mengenai cara menanam yang baik dan serba-serbi pertanian (*Djawa Baroe*, 1 September 1943).

Selain dengan berbagai kursus dan pelatihan pertanian, pelajar dan sekolah pun berperan dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang. Pelajar di sekolah pertanian mempelajari dan meneliti terkait jenis bibit baru, pembuatan pupuk, dan teknik dalam pertanian. Guna meningkatkan hasil makanan, para pelajar Sekolah Pertanian di Sukabumi dan pelajar Sekolah Pertanian Tinggi di Bogor mempelajari mengenai ilmu ukur (*Djawa Baroe*, 1944a). Di tahun 1945, Sekolah Tabib Hewan di Bogor menjadi sekolah kedokteran yang menggunakan cara Jepang dalam keseluruhan sistemnya. Sekolah tersebut tidak hanya melakukan penelitian terkait penyakit pada hewan dan cara pengobatannya saja, melainkan juga meneliti terkait cara meningkatkan jenis hewan ternak yang unggul. Selain itu, dipelajari dan diteliti pula bagaimana memanfaatkan tenaga hewan serta cara meningkatkan hasil bumi dengan pupuk kandang (*Djawa Baroe*, 1945). Dapat terlihat bahwa pemerintah

pendudukan Jepang berupaya sebisa mungkin untuk memanfaatkan segala bidang yang dapat mendukung peningkatan ekonomi dalam menunjang kebutuhan perang.

Pengerahan Tenaga Rakyat

Selama masa pendudukan, banyak dilakukan pengerahan tenaga kerja yang direkrut dari desa-desa di Indonesia. Pada mulanya, pemerintah pendudukan Jepang hanya memberikan anjuran untuk pekerjaan “sukarela”. Sistem kerja tersebut memang hanya sukarela alias tidak ada upah. Pekerjaan yang dilakukan pun bukan untuk turun dalam medan perang, melainkan melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup masyarakat, seperti membangun jembatan, jalan raya, lapangan, dan lain sebagainya (*Tjahaja*, 15 Januari 1943).

Pada pembangunan jalan Tjemplang–Tiiga di Bogor *Ken*, pemerintah setempat mengerahkan masyarakat sekitar guna membangun jalan yang memiliki anggaran f 4.500 tersebut (*Tjahaja*, 23 Februari 1943). Pada Agustus 1943, juga dikerahkan sebanyak 3000 orang untuk bekerja memperbaiki jalan yang menghubungkan antara Sukabumi–Pelabuhan Ratu sepanjang 12 kilometer yang rusak oleh longsor (*Tjahaja*, 19 Agustus 1943). Selain pembangunan jalan, pengerahan tenaga rakyat juga digunakan untuk membangun lapangan olahraga. Di Cianjur *Ken*, setiap harinya terdapat lebih dari 200 pemuda yang bekerja untuk membangun lapangan loji (*Tjahaja*, 11 Mei 1943).

Pada pertengahan tahun 1943, pengerahan tenaga rakyat semakin berkembang menjadi eksploitasi. Pekerjaan pun berkaitan langsung dengan kebutuhan perang (Isnaeni, 2008). Hal tersebut terus berlangsung hingga pada puncaknya di tahun 1944. Pengerahan tenaga rakyat yang sebelumnya hanya sukarela mulai dikenal dengan *Romusa*. Pemerintah pendudukan Jepang mulai merekrut dan mengerahkan tenaga kerja secara besar-besaran secara paksa. Pada 30 Maret 1944, terdapat 180 orang dari Bogor yang dikerahkan untuk bekerja di luar Pulau Jawa (Zuhdi, 2017). Masyarakat yang akan dipekerjakan sebagai romusa akan didaftarkan di Jakarta, salah satunya di Kantor Jakarta *Tokubetsu*. Setelah terdaftar, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit (*Asia Raya*, 1944b). Namun, masyarakat juga dapat mendaftarkan diri kepada Badan Pembantu Prajurit Pekerja yang ada di setiap daerah (Sofansyah, 2019).

Proyek lainnya adalah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Saketi–Bayah sepanjang 150 kilometer di daerah Banten serta pembangunan jalan raya selatan Banten yang menghubungkan Malimping dengan Bayah. Sekitar 11 kilometer dari Bayah, terdapat penambangan emas, timah, dan seng di Cikotok yang mempekerjakan kurang lebih 1.200 tenaga romusa setiap hari. Dalam proyek tersebut, banyak didatangkan romusa dari berbagai *shū*, di antaranya dari Sukabumi, Bogor *Shū*. Romusa yang dikirim ke daerah Banten maupun daerah lain umumnya adalah para petani dari desa maupun penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (Sulasman, 2013). Di daerah perkebunan teh Cipanas, Bogor, banyak petani yang masih dalam kondisi

sehat dan produktif bekerja diwajibkan untuk menjadi romusa di daerah Ciseeng (Saring & Husin, 2017).

Namun, sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai kuli atau buruh hidup penuh kekurangan. Mereka telah bekerja dengan keras, tetapi tidak mendapatkan upah yang sebanding. Kondisi serba kekurangan menjadikan mereka hidup dalam kondisi yang tidak layak. Selain pemenuhan pangan dan kesehatan yang tidak layak, banyak pula romusa yang gugur karena kecelakaan kerja di lapangan. Contohnya para pekerja yang tewas tertimbun ketika melakukan penggalian emas di Cikotok. Hal serupa juga terjadi pada pembangunan lapangan terbang di Cikoleang, Rumpin (Anggraeni, 2010). Kecelakaan kerja yang dialami oleh para romusa dapat diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai cara kerja alat. Selain itu medan yang berbahaya juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja, misalnya di penambangan (Sofansyah, 2019).

KESIMPULAN

Di bidang pertanian dan perkebunan, pemerintah pendudukan Jepang menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan hasil produksi, di antaranya membuka dan mengalihfungsikan lahan, inovasi bibit dan teknik penanaman, serta mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para petani. Pemerintah pendudukan Jepang juga mengatur terkait perdagangan yang menjadi kegiatan ekonomi yang penting bagi masyarakat. Kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari, kenaikan harga barang, dan maraknya pasar gelap mewarnai kehidupan perdagangan. Pemerintah pendudukan Jepang pun berupaya menanggulangi berbagai permasalahan tersebut dengan mengatur keluar dan masuknya barang, menetapkan harga pasar, serta mengawasi kegiatan perdagangan secara ketat. Di samping itu, masyarakat pun berupaya mempertahankan keadaan ekonomi mereka dengan membangun perusahaan atau industri, baik industri secara besar maupun industri rumahan. Di masa pendudukan Jepang, banyak masyarakat miskin yang perlu mendapatkan bantuan. Terdapat usaha perbaikan ekonomi baik dari pemerintah, organisasi sosial, maupun dengan pertunjukan atau pasar amal. Kebijakan ekonomi lainnya yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah *kumiai* dan gerakan menabung. Menjelang akhir masa pendudukan, diberlakukan sistem tenaga kerja romusa. Pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan kesenian sebagai propaganda, peranan tokoh Islam dan elite masyarakat, serta pendidikan sebagai alat dalam mendukung kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R. (2010). *Bogor pada Masa Bersiap 1945-1946*. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20161006#>
- Asia Raya*. (1944a, September 2). *Pakaian Oentoek Fakir Miskin*.
- Asia Raya*. (1944b, September 25). *Rōmusha Sukarela*.

- Djawa Baroe*. (1944a, April 1). *Pahlawan Dilapang: Melipatgandakan Hasil Makanan*.
- Djawa Baroe*. (1944b, August 1). *Taboengan Oeang Tonari Gumi*.
- Djawa Baroe*. (1945, February 1). *Sekolah Tabib Hewan di Bogor*.
- Djawa Baroe*. (1943, 1 Maret). Tentang industri karet di Jawa.
- Djawa Baroe*. (1943, 1 Mei). Tentang latihan pertanian di Jawa tahun 1943.
- Djawa Baroe*. (1943, 1 September). Tentang latihan pemimpin pertanian di Bogor.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189–205.
- Irianti, M. B. (2014). Menabur kebiasaan : Propaganda gerakan menabung Jepang (1941-1945). *Lembaran Sejarah* 11(1), 71–81.
- Isnaeni, H. F., & Apid. (2008). *Romusa: Sejarah yang terlupakan (1942-1945)*. Ombak.
- Kahin, G. M. (1970). *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia*. UNS press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. PT Tiara Wacana.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan sosial di Pedesaan 1942-1945*. Komunitas Bambu.
- Saring, J. B., & Husin, H. (2017). *Diantara bayang-bayang eksploitasi perkebunan dan involusi pertanian: Kehidupan petani di Bogor 1905-1960an*. https://www.researchgate.net/publication/335203282_Diantara_Bayang-Bayang_Eksploitasi_Perkebunan_dan_Involusi_Pertanian
- Soelaeman, M. M. (2011). *Ilmu sosial dasar: Teori dan konsep ilmu sosial*. Refika Aditama.
- Sofansyah, D. Y. (2019). *Propaganda romusa sandiwara dari Jepang*. Martapadi Presindo.
- Sudrajat, E. (2015). *Bogor masa revolusi 1945-1950: Sholeh Iskandar dan Batalyon O Siliwangi*. Komunitas Bambu.
- Sulasman. (2013). Panasnya matahari terbit derita rakyat Sukabumi Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5(3), 431–448.
- Tjahaja. (1943, 6 Januari). Tentang laporan penutup Koperasi Rakyat Indonesia tahun 1942.
- Tjahaja. (1943, 13 Januari). Tentang padi Gadu.
- Tjahaja. (1943, 13 Januari). Tentang laporan Kantor Perburuhan dan Amal.
- Tjahaja. (1943, 15 Januari). Tentang anjuran melakukan pekerjaan sukarela.
- Tjahaja. (1943, 30 Januari). Tentang bantuan bagi 500 fakir di Sukabumi.
- Tjahaja. (1943, 1 Februari). *Pertemoean Penanam-penanam Karet*.
- Tjahaja. (1943, 12 Februari). *Berita Pemerintah: Tanaman Djarak*.

- Tjahaja. (1943, 12 Februari). f 300 - Bagi Menjamak Koelit.*
- Tjahaja. (1943, 13 Februari). Tentang kegiatan Badan Penolong Orang Miskin atau BAPOM.*
- Tjahaja. (1943, 13 Februari). Orang Tani.*
- Tjahaja. (1943, 17 Februari). Memperloeas Pasar Haminte.*
- Tjahaja. (1943, 20 Februari). Poetjoek Teh.*
- Tjahaja. (1943, 23 Februari). Jalan Tjemplang-Tiiga.*
- Tjahaja. (1943, 24 Februari). Koersoes Pertanian.*
- Tjahaja. (1943, 10 Maret). Makloemat.*
- Tjahaja. (1943, 20 Maret). Koersoes Tani.*
- Tjahaja. (1943, 23 Maret). Harga Minjak Kelapa.*
- Tjahaja. (1943, 29 Maret). Memadjoekan Pertemoean Rakjat.*
- Tjahaja. (1943, 5 April). Mendirikan Pasar di Tjikalong.*
- Tjahaja. (1943, 6 April). Poesat Koperasi Bogor Syuu.*
- Tjahaja. (1943, 6 April). f 3000 - Boeat Menjokong Kaoem Miskin.*
- Tjahaja. (1943, 7 Mei). Harga Minjak Kelapa Paberik.*
- Tjahaja. (1943, 11 Mei). Barisan Tjangkoel Giat.*
- Tjahaja. (1943, 15 Mei). 500 Ha Oentoek Pendoedoek.*
- Tjahaja. (1943, 15 Mei). Semangat Menaboeng.*
- Tjahaja. (1943, 18 Mei). Harus Mendapat Izin.*
- Tjahaja. (1943, 19 Mei). Hasil Panen Memuaskan.*
- Tjahaja. (1943, 18 Juni). Koperasi Baroe.*
- Tjahaja. (1943, 2 Juli). Pembentoekan Koperasi di Desa-desa.*
- Tjahaja. (1943, 9 Juli). f 20.080 - Oentoek Sosial.*
- Tjahaja. (1943, 9 Juli). Oeroesan Pasar Bogor Shi.*
- Tjahaja. (1943, 19 Juli). Disekitar Koersoes Pertanian.*
- Tjahaja. (1943, 31 Juli). Pendjoealan Bahan Pakaian.*
- Tjahaja. (1943, 19 Agustus). 3000 Orang Mendapat Pekerdjaan.*
- Tjahaja. (1943, 25 Agustus). Pasar Malam Tjiandjoer.*
- Tjahaja. (1943, 7 Oktober). Doenia Koperasi.*
- Zuhdi, S. (2017). *Bogor zaman Jepang 1942-1945*. Komunitas Bambu.